

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika
-, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Ke Empat, Jakarta : Rajawali Press
- Kaputra, Iswan, 2013, *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sudarto, 1995, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunarno, Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sunggono, Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Alfabeta
- Wijaya, HAW, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mahdi, Imam, 2011, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta : Teras

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. UUD NRI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengaturan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

C. JURNAL- JURNAL

1. Putranto, Ghanang Sri, Amiek Soemarmi, Solechan, 2014, *Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Dalam Upaya Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penghapusan Pekerja Anak*, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 3, Nomor 2, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>
2. Andhika Della Permana Putra, 2014, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Siti Rodhiyah, Muhammad Harir, 2015, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak*. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Volume II Nomor 2.